

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Gerakan rakyat dan pemberontakan yang dimulai di Tunisia pada tahun 2010 dan menyebar ke semua negara Timur Tengah dari waktu ke waktu memiliki pengaruhnya di seluruh dunia, terutama di negara-negara Uni Eropa. Saat ini, migrasi massal, yang menimbulkan masalah politik, ekonomi, dan sosial budaya yang besar, telah menyebabkan perubahan dalam kebijakan UE.

Musim Semi Arab (Arab Spring) yang menyapu kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, pada 2011 lalu, sempat memberikan harapan bahwa negara-negara di 'Jantung Islam' itu bakal dilanda gelombang keempat demokrasi. Namun, hanya beberapa negara yang berhasil, seperti Maroko dan Tunisia. Sementara, negara-negara lainnya seperti Mesir mengalami arus balik kediktatoran, sebagian lainnya terjebak dalam perang berkepanjangan. Penduduk negara-negara itu pun ke mudian menjadi korban. Kematian dan kehancuran yang terus terjadi akibat kecamuk perang, membuat banyak orang terusir dari rumah-rumah tempat tinggalnya. Mereka kemudian dipaksa hijrah ke kamp-kamp pengungsian di dalam dan di luar negaranya, serta menjadi pencari suaka dan imigran (UNCHR, 2015).

Negara-negara Uni Eropa adalah wilayah yang terus-menerus terkena imigrasi sepanjang proses sejarah, karena tingkat kesejahteraan ekonomi dan politik

mereka tinggi dari negara lain. Dalam konteks ini, negara-negara UE yang terus-menerus menerima imigrasi telah bertujuan untuk mengembangkan kebijakan migrasi bersama di antara negara-negara UE dengan berpikir untuk mengendalikan dampak positif dan negatif dari migrasi sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Migrasi massal yang terjadi setelah Arab Spring dan perang saudara di Suriah beralih ke UE, menyebabkan krisis pengungsi di perbatasan UE. Kedatangan migrasi massal yang cepat ke perbatasan UE telah menjadi masalah global bagi UE, sekali lagi dan pada awal masalah yang perlu diselesaikan terlebih dahulu dan terutama. Negara-negara yang membentuk perbatasan eksternal UE telah terpapar pada migrasi massal dan tidak teratur ke UE.

Penataan Alur Migrasi oleh Uni Eropa Untuk memastikan para migran mendapatkan perlakuan sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah disepakati bersama, Uni Eropa telah mengadopsi berbagai aturan dan kerangka kerja untuk mengelola arus migrasi dengan membedakan kualifikasi terhadap para migran yang terdiri dari *Asylum Seekers*, *Highly Skilled Workers*, *Student and Researchers*, *Seasonal Workers* dan *Family Reunification*. Selain menetapkan kualifikasi terhadap para migran, Uni 45 Eropa juga menata arus migrasi dengan membuat aturan umum yaitu, merelokasi ribuan pencari suaka dari Yunani dan Italia, perjanjian penerimaan kembali terhadap imigran gelap, dan proses permintaan suaka (Council of the EU, 2018).

Kedekatan Geografis Benua Eropa dan Benua Afrika hanya dipisahkan oleh Laut Mediterania. Kedekatan geografis ini dinilai memudahkan para imigran untuk datang ke Eropa. Menurut data yang diperoleh dari PBB (Perserikatan Bangsa-

Bangsa) sampai dengan tahun 2015, terdapat 455 juta imigran di dunia. Negara yang paling diminati oleh para imigran sebagai negara tujuan adalah Eropa (76 juta), lalu diikuti Asia (75 juta), dan Amerika Utara (54 juta) (Nation, 2016).

Untuk tahun 2015 sendiri, jumlah migran yang sampai ke Eropa sebanyak 1.046.599 migran, sebagian besar melewati laut sebanyak 1.011.712 sedangkan sebagian yang lain melewati darat sebanyak 34.887 migran (IOM, 2016). Mayoritas negara asal para migran merupakan negara yang dilanda konflik seperti Suriah, Afghanistan, dan Iraq. Berikut persentase 10 kewarganegaraan imigran terbanyak yang sampai di Eropa pada tahun 2015 (IOM, Migrant From Pakistan Interviewed Along Mediterranean Routes in 2016 and 2017, 2017).

Kebijakan nasional yang diterapkan oleh negara-negara perbatasan UE, terutama oleh negara-negara seperti Italia, Hungaria dan Bulgaria, telah menimbulkan berbagai ketidaksepakatan dalam kerangka UE. Setelah migrasi massal, yang dimulai di Tunisia pada tahun 2010 dan dimulai dengan perang saudara Suriah, beralih ke Italia, negara-negara anggota menciptakan masalah di antara negara-negara anggota karena mereka tidak dapat berbagi masalah yang disebabkan oleh migrasi bersama. Menanggapi situasi ini, Italia memberikan izin tinggal kepada para pengungsi Tunisia dan para pengungsi ini memperoleh hak untuk bergerak bebas di dalam perbatasan Uni Eropa dan di wilayah Schengen. Diperkirakan bahwa UE akan memperbarui dan memperbarui kebijakan migrasi bersama dalam menghadapi migrasi massal dan tidak teratur.

Uni Eropa telah memperbaharui kebijakan untuk melindungi kepentingan sosial- ekonomi negara-negara anggota dalam menghadapi arus migrasi massal

yang dimulai dengan The Arab Spring. Dalam konteks ini ada beberapa hal yang menjadi kebijakan Uni Eropa saat ini, yaitu;

a. Perjanjian Penerimaan Kembali;

Orang yang memasuki suatu negara secara tidak sah dan telah memasuki negara tersebut melalui jalur ilegal dan tempat pemasukan lainnya yang ditentukan secara umum oleh undang-undang, dan yang masih berada di negara tersebut, meskipun pada saat masuk telah memenuhi semua syarat tersebut, karena berakhirnya masa berlaku visa atau alasan-alasan serupa, yaitu perjanjian-perjanjian yang memuat pengaturan pengiriman orang-orang tersebut ke negara-negara di mana mereka menjadi warga negaranya karena tidak memenuhi syarat-syarat (Çelik, 2014:1). Melalui perjanjian ini, UE mengadopsi kebijakan yang berfokus pada memerangi migrasi tidak teratur dan kontrol perbatasan internal/eksternal, dan karenanya, bertujuan untuk membebaskan tanggung jawab kepada negara ketiga dalam memerangi migrasi tidak teratur dan massal. Dalam arah ini, UE sejauh ini telah menandatangani perjanjian penerimaan kembali dengan 18 negara. Dari 18 perjanjian yang telah ditandatangani, 15 telah mulai berlaku. Dalam hal ini, perjanjian pertama ditandatangani dengan Maroko pada tahun 1996, sedangkan perjanjian terakhir ditandatangani dengan Azerbaijan pada tahun 2014 (Çelik, 2014: 2).

b. Kebijakan Lingkungan Eropa;

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengembangkan kebijakan lingkungan dengan negara pengirim untuk memecahkan masalah yang

menyebabkan imigran yang masuk ke negara-negara UE secara ilegal untuk bermigrasi di negara asal mereka. Dalam konteks ini, ditunjukkan untuk memecahkan masalah sosial-ekonomi dan budaya seperti aksi teroris, perdagangan narkoba, perdagangan perempuan yang disebabkan oleh migrasi massal di dalam perbatasan Uni Eropa (Samur, 2008: 179).

c. Negara Ketiga yang Aman;

“Konsep negara ketiga yang aman mengacu pada negara di mana seorang pengungsi tinggal sebelum mengajukan permohonan suaka di negara mana pun, atau memenuhi syarat untuk mengevaluasi permintaan suaka (Duruel, 2017:8).

*Common European Asylum System (CEAS)* merupakan kebijakan yang dibuat sebagai bukti bahwa Uni Eropa merupakan organisasi yang menjunjung tinggi HAM dan memiliki intensi untuk berperan aktif dalam penyelesaian krisis kemanusiaan global. Implementasi CEAS diterapkan oleh EASO sebagai pusat keahlian suaka di Eropa untuk menangani masalah pengungsi dalam relokasi dan pemukiman kembali dengan sumber pendanaan dari AMIF. Agenda Eropa tentang Migrasi dikeluarkan untuk membantu negara anggota UE agar mengelola semua aspek migrasi dengan lebih baik.

## **5.2 Saran**

Dari pemaparan yang telah peneliti lakukan mengenai Dampak Migrasi Massa Pasca Arab Spring Terhadap Perubahan Kebijakan Imigran di Uni Eropa, peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya dapat memfokuskan penelitian mengenai dampak sosial yang terjadi kepada imigran di tempatnya

bermigrasi. Karena dalam penelitian ini fokus permasalahan dilihat dari sisi Uni Eropa sebagai negara tempat imigrasi, sedangkan dampak terhadap imigrannya masih belum dibahas dalam penelitian kali ini.